



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYARIFUDDIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 720693

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 370.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m²/164 m² di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 490 m²/60 m² di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
3. Tanah Seluas 840 m² di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 113.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 1987, HASIL SENDIRI Rp. 43.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU PICK UP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 113.200.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 10.460.788

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 606.660.788

III. HUTANG

Rp. 500.936.500

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 105.724.288

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.